



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 25 Oktober 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

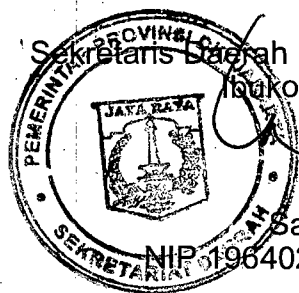
NOMOR 61/SE/2017

TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI DPRD
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR
MASA JABATAN GUBERNUR TAHUN 2013-2017**

Menindaklanjuti Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban-Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, dengan ini saya minta kepada Saudara untuk memberikan jawaban/penjelasan/rencana tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut sebagaimana terlampir, serta melaporkannya kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta (softcopy dapat dikirim ke lkpj@bapedadki.net) paling lambat hari Jumat, 27 Oktober 2017.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP. 196402111984031002

Lampiran : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 61/SE/2017
Tanggal 25 Oktober 2017

Daftar Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
31. Para Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi
32. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
33. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
34. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
35. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
36. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
37. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
38. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
39. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
40. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
41. Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Naskah Rekomendasi		Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD						
	Menindaklanjuti Surat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1844/-073.61 tanggal 23 Agustus 2017 perihal Penyampaian LKPJ-AMJ Tahun 2013-2017. DPRD Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap substansi materi atas Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.	Informasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 1; Pidato DPRD Hal. 2			
	Pembahasan dan pendalaman yang dilaksanakan oleh DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, mengacu Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.	Informasi				
	Selanjutnya, berdasarkan hasil Pembahasan DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Provinsi, DKI Jakarta Tahun 2013-2017, DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Surat Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 60. Tahun 2017 tentang Hasil pembahasan DPRD Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.	Informasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 1			
	Dari hasil Pembahasan DPRD Provinsi DKI Jakarta atas LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, DPRD Provinsi DKI Jakarta Merekomendasikan hal sebagai berikut:	Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 1			
1	Peningkatan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) dari 78,08 (tujuh puluh delapan koma nol delapan) pada tahun 2013, meningkat hingga 79,60 (tujuh puluh sembilan koma enam puluh) pada tahun 2016, yang mengindikasikan besarnya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan. Indikator Ekonomi yang menunjukkan kinerja yang menggembirakan serta berbagai upaya penanggulangan kemiskinan sebagai Indikator Sosial yang mengalami kenaikan sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Hal ini perlu diimbangi dengan terus meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga berbagai upaya pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur kota yang telah dikerjakan benar-benar dapat meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat.	Rekomendasi		Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPS	
2	Program Pengembangan Sistem Transportasi melalui Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Busway, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun koridor 13 (tiga belas) Ciledug-Tendean sepanjang 9,4 (sembilan koma empat) km dan didukung dengan penambahan 962 (sembilan ratus enam puluh dua) unit bus, Pembangunan Angkutan Umum Masal Berbasis Rel seperti pembangunan MRT Jakarta Koridor Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang ±16 (enam belas) km. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Hal ini perlu didukung dengan kesiapan SDM, sarana dan prasarana yang lengkap serta upaya peningkatan kinerja pelayanan.	Rekomendasi		Perekonomian, SPKLN	Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga	

Naskah Rekomendasi	Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
3 Program Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan Air, yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pembangunan Tanggul ANICD pada Aliran Tengah dengan pemancangan sheetpile sepanjang 3.683 m di Luar Batang dan Muara Baru, pembebasan tanah untuk waduk, setu, embung dan kali/saluran seluas 452.937 m2, dan penataan Waduk Pluit dan Waduk Rio-Rio. Hal ini harus didukung dengan upaya pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan terus menerus serta upaya pengamanan asset yang baik.	Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 2	- SPKLN	Dinas Sumber Daya Air	
4 DPRD memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota yang dilakukan melalui pembangunan 5.177 unit Rumah Susun, perbaikan dan penataan kampung melalui program Kampung Deret di 40 lokasi dan penataan lingkungan kumuh pada 142 RW kumuh serta pembangunan 123 lokasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Menyikapi hal tersebut DPRD berharap agar program yang telah dilaksanakan terus ditingkatkan serta dipelihara dengan melakukan pemeliharaan dan pengamanan asset yang baik, termasuk terhadap program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH.	Rekomendasi		- SPKLN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kehutanan	
5 Program Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan melalui aktivitas pembersihan yang dilakukan oleh Petugas Prasarana Sarana Umum (PPSU), dan didukung oleh peralatan-peralatan kebersihan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, harus terus dimaksimalkan pelaksanaannya dengan peningkatan kinerja dan perawatan peralatan yang digunakan.	Rekomendasi		- Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	
6 Program Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja yang meliputi penyediaan informasi Pasar Kerja off-line dan on-line yang melibatkan 195 (seratus Sembilan puluh lima) perusahaan agar lebih dioptimalkan dan dilanjutkan secara terus-menerus sehingga dapat meningkatkan penempatan dan penyediaan lowongan kerja, serta mendukung para wira usaha yang telah dibangun.	Rekomendasi		- Perekonomian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Energi	
7 Menanggapi Program Pembangunan Budaya Multi Kultur yang dilakukan melalui Pelestarian Budaya Betawi, dan Penataan Kawasan (lansekap), Program Peningkatan Pelayanan Publik, dan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan seperti pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), DPRD memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai selama kurun waktu 2013-2017. Untuk itu DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap agar prestasi yang telah di capai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.	Rekomendasi		- Perekonomian, SPKLN, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pendidikan	
BIDANG PEMERINTAHAN					
1 SKPD/UKPD dibawah koordinasi DPRD Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 22 SKPD, 63 UKPD, 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan yang melaksanakan 6 urusan dan 67 Program terdiri dari:	Informasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 2,			
a Urusan Perencanaan Pembangunan terdiri dari 7 program	Informasi	Picato DPRD Hal. 4	- Pemerintahan	- Bappeda	
b Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 6 program	Informasi		- Pemerintahan	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
c Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri terdiri dari 4 program	Informasi		- Pemerintahan	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
d Urusan Statistik terdiri dari 1 program dan urusan Komunikasi dan Informatika terdiri dari 5 program	Informasi		- Pemerintahan	- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

Naskah Rekomendasi		Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD																																														
e	<p>Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian terdiri dari 44 program, Sekretariat DPRD, Biro Tata Pemerintahan, Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro Umum, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 44 Kecamatan dan 256 Kelurahan.</p>	Informasi		- Pemerintahan	Sekretariat DPRD, Biro Tata Pemerintahan, Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro Umum, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Inspektorat, Bappeda Pemerintahan																																															
2	Program SKPD/UKPD pada APBD 2013 - 2017 dibawah koordinasi bidang Pemerintahan.	Informasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 3	- Pemerintahan																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Tahun</th> <th colspan="2">APBD Penetapan</th> <th colspan="2">APBD Perubahan</th> <th rowspan="2">Selisih</th> </tr> <tr> <th>Jumlah program</th> <th>Jumlah program</th> <th>Jumlah program</th> <th>Jumlah program</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2013</td> <td>80</td> <td>83</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2014</td> <td>125</td> <td>125</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2015</td> <td>92</td> <td>93</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2016</td> <td>87</td> <td>87</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2017</td> <td>85</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Tahun	APBD Penetapan		APBD Perubahan		Selisih	Jumlah program	Jumlah program	Jumlah program	Jumlah program	1	2013	80	83		3		2	2014	125	125		-		3	2015	92	93		1		4	2016	87	87				5	2017	85					Informasi				
No.	Tahun			APBD Penetapan		APBD Perubahan			Selisih																																											
		Jumlah program	Jumlah program	Jumlah program	Jumlah program																																															
1	2013	80	83		3																																															
2	2014	125	125		-																																															
3	2015	92	93		1																																															
4	2016	87	87																																																	
5	2017	85																																																		
3	Penambahan 3 program pada APBD Tahun 2013	Informasi																																																		
a	Program Peningkatan kemampuan penanggulangan kesehatan akibat bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana pada kegiatan kerjasama Diklat Basic Fire Rescue dengan negara Palestina dan Maputo Tahun 2013 Rp. 327.000.000	Informasi		- Pemerintahan	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan																																															
b	Program peningkatan peran forum komunikasi kerukunan antar umat beragama :	Informasi		- Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																																															
	1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKSEL pada Kegiatan Operasional Tim Fasilitas Orkemas Rp. 100.000.000	Informasi		- Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																																															
	2 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKSEL pada Kegiatan Peningkatan pemahaman nilai-nilai dasar kerukunan umat beragama bagi generasi muda Rp. 300.000.000,-	Informasi		- Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																																															
c	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2012 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Kegiatan Publikasi dan Informasi Pemilu Tahun 2014 Rp. 100.000.000	Informasi		- Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sekretariat Kabupaten Adm. Kep. Seribu																																															
4	Pada Tahun 2015 terdapat Penambahan 1 Program pada SKPD Biro Hukum yaitu : Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia :	Informasi		- Pemerintahan	Biro Hukum																																															
	1 Kegiatan Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Rp. 411.314.500	Informasi		- Pemerintahan	Biro Hukum																																															
	2 Pengurusan perkara di Pengadilan Berta sengketa pertanahan Rp. 396.000.000	Informasi		- Pemerintahan	Biro Hukum																																															
5	Anggaran SKPD/UKPD pada APBD 2013 - 2017 dibawah koordinasi bidang Pemerintahan	Informasi		- Pemerintahan	Bappeda																																															

Naskah Rekomendasi							Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
Tahun	APBD Penetapan Anggaran	APBD Perubahan Anggaran	Selisih Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase		Informasi		Pemerintahan	Bappeda	
1	2013	3.965.972.684.557	3.983.384.672.760	17.411.988.203	3.203.783.215.857	80,43%					
2	2014	5.296.824.043.118	5.450.218.349.010	153.394.305.892	3.680.434.369.786	67,53%					
3	2015	5.000.641.924.842	4.664.290.920.117	336.351.004.725	2.385.522.626.340	51,14%					
4	2016	3.395.709.186.610	3.237.172.165.256	122.537.021.354	2.586.417.150.911	79,86%					
5	2017	3.981.908.511.963	-	3.981.908.511.563	1.757.936.854.760	44,15%					
6	<p>Adanya kenaikan anggaran dari Tahun 2013 sebesar Rp. 3,98 Tiliun menjadi 5,45 Tiliun pada tahun 2014 antara lain diakibatkan adanya belanja sarana dan prasarana Damkar kurang lebih sebesar Rp. 1,2 triliun. Dan pada APBD Tahun 2015 muncul kebijakan terkait tugas penanganan prasarana dan sarana umum pada masing-masing Kelurahan (berdasarkan Pergub 196 Tahun 2015). dalam APBD Tahun 2016 terjadi penurunan anggaran menjadi Rp.3,2 triliun akibat adanya kebijakan pemberlakuan system TKD (adanya kebijakan untuk merubah/mengkonversi honor kegiatan pada Belanja Langsung menjadi Tunjangan yang berbasis kinerja pada Belanja Tidak langsung. Pada APBD Tahun 2017 terjadi kenaikan anggaran menjadi Rp.3,98 triliun antara lain diakibatkan adanya penggabungan PHL pada Dinas Pertamanan & Pemakaman dan Dinas Kebersihan pada Kelurahan (Kegub No.2331 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Pekerja PPSU).</p>						Informasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 4	Pemerintahan dan SPKLN	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebersihan	
7	<p>Adanya kebijakan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta membuat Peraturan Gubernur No 160 tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 untuk payung hukum anggaran daerah tahun anggaran 2015-2016 menjadikan keterlambatan proses administrasi keuangan daerah tahun menyebabkan dari seluruh SKPD dalam penyerapan menjadi terkendala alias tidak maksimal dalam penyerapan yang mengakibatkan rendahnya prosentasi penyerapan ada yang hanya 10% dan maksimal 80 %, kebijakan ini dilakukan akibat ketidak harmonisan dalam pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif.</p>						Informasi		Pemerintahan	Bappeda Bidang PPP	
8	<p>Program pembangunan kantor kelurahan yang belum tercapai secara keseluruhan dengan standar pelayanan prima, masih ada kantor yang belum terbangun dengan baik dalam periode kali ini, masih ada 14 kantor kelurahan se Jakarta yang belum memenuhi standar yang baik,</p>						Rekomendasi		Pemerintahan	Sekretariat Kota/ Kabupaten Administrasi	
9	<p>Pelayanan pembuatan identitas kependudukan atau e-Ktp yang tidak juga selesai permasalahannya, dikarenakan program ini adalah program dari pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri yaitu Ditjen kependudukan, yang berdampak ketidak adanya blangko KTP untuk penduduk yang membutuhkan apalagi hal tersebut sangat diperlukan untuk kebutuhan pilkada Jakarta tahun 2017, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh melakukan pengadaan blangko tersebut.</p>						Informasi		Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
10	<p>Kurangnya koordinasi antara Dinas dan Suku Dinas sehingga program yang sudah dianggarkan tidak dapat terlaksana. Dengan tidak terlaksananya program apakah Tunjangan Kerja Dinamis PNS di Dinas atau Suku Dinas terkait juga rendah atau sebaliknya? Hal ini tidak dapat dijelaskan karena pihak Asisten Pemerintahan dan BAPPEDA tidak berkaitan langsung dengan TKD.</p>						Rekomendasi		Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	
11	<p>Berkaitan dengan pemberian Tunjangan Kerja Daerah PNS, sebetulnya sebanding dengan penyerapan anggaran. Namun terdapat beberapa SKPD yang penyerapannya rendah dibawah 50% tetapi TKD nya tinggi, sehingga kedepan perlu ada solusi, untuk menyusun skema baru TKD yang terdapat di SKPD/JKPD yang rendah serapannya.</p>						Rekomendasi		Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	

Naskah Rekomendasi	Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
12 Sehubungan dengan hal tersebut di atas DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan sebagai berikut.		Lampiran Kep. DPRD Hal. 5, Pidato DPRD Hal. 4-5			
1 Masing-masing SKPD untuk meningkatkan kinerja kerjanya khususnya yang berkaitan dengan semua program yang telah direncanakan dan disepakati oleh DPRD. Hal ini mengingat penyerapan anggaran yang maksimal dan optimal diharapkan mampu mendorong percepatan pencapaian target pembangunan. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan dengan realisasi, menunjukkan masih rendahnya SDM SKPD dalam membuat perencanaan yang lebih adaptasional, sistematis, terukur dan tepat manfaat. Hal ini berdampak kepada perencanaan pembangunan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program kegiatan belum terintegrasi antar SKPD, duplikasi program dan kegiatan, hingga bentangan antar program kegiatan antar SKPD. Ketidajelasan sasaran dan target yang ingin dicapai aspek komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan perencanaan pembangunan DKI Jakarta. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan diperlukan, supervisi, monitoring dan evaluasi perencanaan dan implementasinya.	Rekomendasi		Pemerintahan	Bappeda Bidang PPPP	
2 Kepada masing-masing SKPD melalui BAPPEDA untuk dapat mensinkronkan seluruh program dan kegiatan agar dapat terintegrasi, sehingga program dan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai rencana dan menghapus ego sektoral di masing-masing SKPD.	Rekomendasi		Pemerintahan	Bappeda Bidang PPPP	
BIDANG PEREKONOMIAN					
Berikut kami sampaikan kesimpulan dan rekomendasi hasil rapat internal DPRD Provinsi DKI Jakarta atas pembahasan LKPJ - AMJ Gubernur Tahun 2013- 2017 sebagai berikut:		Lampiran Kep. DPRD Hal. 5, Pidato DPRD Hal. 6-7			
1 Jumlah penduduk miskin di Provinsi DI Jakarta sejak tahun 2013 masih mengalami peningkatan. Terakhir pada tahun 2016 tercatat penduduk miskin di DKI Jakarta sebanyak 385.840 orang atau 3,75 % dari total penduduk jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta.	Informasi		Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial dan Biro Kesejahteraan Sosial	
2 Pengembangan pasar di DKI Jakarta yang masih melakukan revitalisasi bangunan pasar jaya tanpa mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dari program atau aplikasi yang berbasis teknologi mengingat kecenderungan masyarakat Jakarta yang lebih menggunakan teknologi informasi untuk membeli sesuatu tanpa perlu pergi ke pasar atau toko modern.	Rekomendasi		Perekonomian	Badan Pembinaan BUMD dan Biro Perekonomian	
3 Pemberian PMD yang di berikan kepada BUMD dalam pemanfaatannya masih dirasakan kurang tepat sasaran.	Rekomendasi		Perekonomian	Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pembinaan BUMD	
4 BUMD KBN sebaiknya dilepas karena sahamnya 26.8% dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta buat BUMD sendiri untuk pelabuhan atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pemilik saham mayoritas.	Rekomendasi		Perekonomian	Badan Pembinaan BUMD	
5 UMKM di tata lebih baik dan menjadi perhatian khusus, UMKM harus di lihat sebagai potensi ekonomi yang besar.	Rekomendasi		Perekonomian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan	
6 Manajemen PTSP harus di perbaiki, pengelolaan SDM harus segera di evaluasi dan regulasi yang berbenturan dalam tats kelola PTSP perlu di Revisi.	Rekomendasi		Perekonomian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Naskah Rekomendasi		Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
7	Dalam RPJMD target pendapatan 120 Triliyun, namun sampai dengan akhir masa jabatan pendapatan hanya 59 Triliyun.	Rekomendasi		Pemerintahan	Bappeda Bidang PPP dan PPP	
8	Sampai dengan saat ini wisata Jakarta belum tumbuh optimal dan yang menjadi catatan khusus adalah pulau seribu dan menjadi destinasi kelas Internasional kebanggaan Jakarta.	Rekomendasi		Perekonomian	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
9	Keberadaan BUMD bisa menjadi alternative dan solusi untuk merekrut tenaga kerja putra putri Daerah.	Rekomendasi		Perekonomian	Badan Pembinaan BUMD	
BIDANG KEUANGAN			Lampiran Kep. DPRD Hal. 6			
Berikut kami sampaikan kesimpulan dan rekomendasi hasil rapat internal						
A Pendapatan Daerah						
<p>Dari sektor pendapatan daerah, berdasarkan RPJMD tahun 2013-2017 dari akumulasi rencana pendapatan daerah sebesar Rp 346.367,85 milyar, realisasinya sampai dengan akhir semester I tahun 2017 sebesar Rp 209.194,45 milyar atau 60,40% dari target RPJMD. Dari ketiga sumber pendapatan daerah, sampai dengan akhir semester I tahun 2017 akumulasi realisasi ketiga pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi Rp145.015,41 milyar (70,29%), dana perimbangan terealisasi sebesar Rp 51.056,58 milyar (41,18%), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp 13.122,46 milyar atau 81,70% dari target RPJMD. Mengingat pencapaian tahun 2013 sampai dengan semester I tahun 2017, dan sisa waktu yang tinggal 6 bulan lagi target RPJMD terhadap pendapatan daerah, menurut DPRD tidak akan tercapai.</p> <p>DPRD memberikan catatan terhadap inkonsistensi perencanaan yang disusun oleh Eksekutif yaitu rencana pendapatan daerah berdasarkan APBD-P yang dikoreksi tiap tahunnya dan selalu lebih rendah dari target menurut RPJMD, kecuali pada tahun 2014.</p> <p>Karena pendapatan asli daerah merupakan tax effort Pemerintah Daerah sendiri sedangkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah merupakan kinerja Pemerintah Pusat. DPRD memberikan catatan terhadap pencapaian pendapatan asli daerah berikut ini.</p> <p>Bila kita mengacu pada APBD-P tahun 2013-2017 sebagai perbandingan terhadap realisasinya, diperoleh gambaran sebagai berikut. Dari sektor pendapatan asli daerah (PAD), berdasarkan APBD-P tahun 2013- 2017 dari akumulasi rencana pendapatan asli daerah sebesar Rp 184.017,02 milyar, realisasinya sampai dengan akhir semester I tahun 2017 sebesar Rp 145.015,41 milyar atau 78,81% dari akumulasi target APBD-P 2013-2017.</p> <p>Dari pendapatan asli daerah ini, sampai dengan akhir semester I tahun 2017 akumulasi realisasi per komponen pendapatan asli daerah yaitu, pajak daerah terealisasi Rp 124.688,37 milyar (79,91%), retribusi daerah terealisasi sebesar Rp 2.252,15 milyar (53,83%), hasil pengelolaan kekayaan-daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp 2.000,39 milyar (88,39%), dan lain-lain pendapatan asli daerah terealisasi sebesar Rp 16.074,50 milyar atau 74,63% dari akumulasi target APBD-P 2013-2017.</p>		Rekomendasi		Perekonomian Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Bappeda PPP	

Naskah Rekomendasi	Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
<p>Sedangkan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) secara tahunan pada tahun 2013-2016, pencapaian tertinggi pada tahun 2013 yaitu terealisasi 102,08% dari target APBD-P sebesar Rp 26.304,10 milyar, dan pencapaian terendah pada tahun 2014 yaitu terealisasi 78,66% dari target APBD-P sebesar Rp 39.757,31 milyar. Meningkatkan kembali pada tahun 2015 yaitu terealisasi 88,73% dan pada tahun 2016 terealisasi 95,81% dari target APBD Perubahan.</p> <p>Rendahnya pencapaian target pada tahun 2014 dan tahun 2015 ini karena terjadi perlambatan ekonomi pada semester 2 tahun 2014 sampai dengan semester 1 tahun 2015, dan tanda-tanda pemulihan ekonomi baru mulai terjadi pada semester 2 tahun 2015 hingga sekarang. Perlambatan ekonomi ini berdampak langsung dan tidak langsung terhadap rencana penerimaan pajak daerah pada tahun-tahun tersebut.</p> <p>Berikut DPRD memberikan beberapa catatan dan rekomendasi terkait dengan kinerja pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pajak daerah.</p>	Rekomendasi		Perekonomian	Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
<p>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)</p>	Rekomendasi	Lampiran Kap. DPRD Hal. 7, Pidato DPRD Hal. 7	Perekonomian	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
<p>Pajak daerah yang terkait dengan kendaraan bermotor selama ini masih menjadi penerimaan yang dominan dari pajak daerah, mencapai lebih dari 40% dari total penerimaan pajak daerah. PBB-KB karena bersifat administrative price maka besarnya penerimaan PBB-KB ini tergantung kebijakan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian untuk akurasi penerimaan PBB-KB menjadi suatu keharusan dengan membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait yaitu PERTAMINA, BPKP, HISWANA MIGAS dan instansi terkait lainnya. Mendapatkan data quota BBM dari perusahaan penyalur BBM dengan bekerja sama dengan Kementerian ESDM. Pencatatan transaksi penjualan BBM melalui "on-line system".</p> <p>Dengan pola perilaku masyarakat yang belum berubah dan beralih ke sistem transportasi publik, kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua masih menjadi andalan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Terlebih dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Program Mobil Murah - LCGC (low cost green car) telah meningkatkan pembelian mobil baru. Disamping itu penerimaan PKB dan BBN-KB sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan pertumbuhan industri kendaraan bermotor pada khususnya.</p> <p>Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk optimalisasi PKB dan BBN-KB menurut DPRD, diantaranya sebagai berikut.</p>	Rekomendasi		Perekonomian	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
-	Rekomendasi		Perekonomian	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
-	Rekomendasi		Perekonomian	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
-	Rekomendasi		Perekonomian	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	

Naskah Rekomendasi		Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan		Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 7, Pidato DPRD Hal. 7-8	Perekonomian	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
<p>Penerimaan dari Janis pajak daerah ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti politik dan keamanan dalam negeri, pertumbuhan ekonomi utamanya pengeluaran konsumsi masyarakat, razia yang dilakukan BNN-POLRI terhadap penjualan dan pemakaian narkoba ditempat-tempat hiburan malam, dan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang membatasi rapat-rapat pemerintah di hotel, sehingga kesemuanya itu menjadi kendala utama dalam pencapaian target dari ketiga Janis pajak ini.</p> <p>Upaya-upaya yang dapat dilakukan, menurut DPRD, dalam rangka optimalisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan diantaranya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan optimalisasi online system ketiga janis pajak ini - Pencatatan tunggakan melalui penempelan sticker dengan bekerjasama dengan KPK-RI, tax clearance program, dan penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) (penagihan aktif sampai dengan sita dan lelang). - Melakukan analisa setoran masa dan setoran masa minimal terhadap perbaikan setoran. - Pemutakhiran dan pendataan WP, dan pemeriksaan terhadap WP - Pengukuhan obyek pajak hiburan terhadap WP Hotel dan WP Restoran yang menjalankan aktifitas hiburan sebagai core businessnya. - Operasi penerbitan bagi usaha hiburan yang tidak/melanggar penjinan bersama Satpol PP, dan Dinas Pariwisata. 		Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi		Perekonomian Perekonomian Perekonomian Perekonomian Perekonomian dan Pemerintahan	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Satpol PP	
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 8, Pidato DPRD Hal. 8-9	Perekonomian	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
<p>Seiring dengan pesatnya pembangunan property di Jakarta sudah sewajarnya PBB-P2 dan BPHTB menjadi primadona baru dalam penerimaan pajak daerah.</p> <p>Pada PBB P-2 permasalahan yang dominan adalah pemberlakuan Pergub No. 259 tahun 2015 yaitu pembebasan PBB P-2 untuk NJOP sampai dengan nilai Rp 1 milyar, sedangkan permasalahan yang dominan untuk BPHTB adalah pemberlakuan Pergub No. 193/2016 berupa pembebasan BPHTB terhadap transaksi dengan NJOP sampai dengan Rp 2 milyar</p> <p>Untuk itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah ini, sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan, pemutakhiran, dan cleansing data base objek dan subjek pajak untuk PBB-P2. - Profiling/reprofiling data objek pajak dan subjek bagi piutang PBB-P2 yang macet - Pemberian stiker dan plang bagi WP besar dan korporasi yang belum membayar PBB-P2 - Pro aktif jemput bola dalam melakukan penagihan PBB-P2 di kelurahan-kelurahan, pelayanan malam hari, pembukaan gerai pajak di mall-mall sehingga diharapkan dapat meningkatkan 		Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi		Perekonomian Perekonomian Perekonomian Perekonomian	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah	

Naskah Rekomendasi		Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
-	Melakukan koordinasi dengan BPN dan PPAT untuk mengetahui jumlah pendaftaran/mutasi sertifikat tanah.	Rekomendasi		- Perkonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
-	Perubahan dasar pengenaan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPBJ) sebagai obyek BPHTB melalui perubahan Perda BPTHB.	Rekomendasi		- Perkonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
	Pajak Parkir		Lampiran Kep. DPRD Hal. 8, Pidato DPRD Hal. 9			
	Dengan belum berkembangnya budaya masyarakat untuk menggunakan sistem transportasi publik maka permintaan akan ruang parkir khususnya ditepi jalan (on-street) harus dikendalikan dan bahkan disubstitusi menjadi parkir off-street.	Rekomendasi		- Perkonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
	Dengan sistim self assessment pada pajak ini make upaya-upaya optimalisasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :					
-	Meningkatkan pengawasan terhadap WP parkir melalui compliance audit dan kalibrasi sistim aplikasi WP untuk mengetahui ketaatan WP.	Rekomendasi		- Perkonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
-	Melanjutkan optimalisasi online system untuk Janis pajak ini.	Rekomendasi		- Perkonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
-	Penerbitan parkir liar dan yang tidak berjin.	Rekomendasi		- Perkonomian	- Dinas Perhubungan	
-	Mengevaluasi tarif pajak parkir yang dikenakan bagi penyelenggara parkir off-street.	Rekomendasi		- Perkonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
	Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Rokok		Lampiran Kep. DPRD Hal. 8, Pidato DPRD Hal. 9-10			
	Pajak rokok adalah pajak daerah yang bersifat given dari Pemerintah Pusat sehingga kerjasama pertukaran data dengan instansi vertikal menjadi suatu keniscayaan.	Rekomendasi		- Perkonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
	Sedangkan pada pajak penerangan jalan, upaya-upaya optimalisasi yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut :					
-	Menyesuaikan tarif PPJ agar sama dengan wilayah sekitar (Bodetabek) dan semula 2,4% menjadi maksimum 6% (secara progresif).	Rekomendasi		- Perkonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
-	Melakukan pemeriksaan data publish PLN bersama dengan instansi vertikal seperti BPKP, PLN, dan KPK-RI.	Rekomendasi		- Perkonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
	Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT)		Lampiran Kep. DPRD Hal. 9, Pidato DPRD Hal. 10			
	Fungsi kedua pajak ini tidak semata-mata hanya fungsi budgetair untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan pengawasan). Hal ini dimaksudkan agar estetika kota dapat dijaga dan degradasi lingkungan dapat dikurangi.	Rekomendasi		- Perkonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
	Permasalahan pada pajak reklame adalah luas white area yang semakin bertambah yang mengurangi potensi pajak reklame, penurunan potensi pajak reklame berupa berkurangnya area media luar ruang karena adanya beberapa proyek-proyek infrastruktur (MRT, LRT) Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pajak reklame dan pajak air tanah, sebagai berikut :					
-	Melakukan pemeriksaan terhadap SKPD PAT nihil dan de-watering.	Rekomendasi		- Perkonomian	- Dinas Perindustrian dan Energi	
-	Pencarian tunggakan melalui penempelan sticker dengan bekerjasama dengan instansi terkait untuk PAT.	Rekomendasi		- Perkonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
-	Penyisiran dan pendataan pajak reklame atas penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) dan penertiban reklame.	Rekomendasi		- Perkonomian dan Pemerintahan	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan Satpol PP	
-	Sosialisasi kepada penyelenggara reklame untuk beralih menggunakan LED.	Rekomendasi		- Perkonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
-	Penyesuaian nilai sewa reklame (NSR).	Rekomendasi		- Perkonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	

Naskah Rekomendasi		Jenis	Sumber	Bappada Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
-	Penyesuaian klasifikasi kelas jalan dan tarif kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame.	Rekomendasi		- Perekonomian dan SPKLN	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Bina Marga	
-	Usulan penerbitan reklame BDU yang masih terpasang/tayang.	Rekomendasi		- Perekonomian	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
B. Belanja Daerah						
	<p>Bila kita mengacu pada APBD-P tahun 2013-2017 sebagai perbandingan terhadap realisasinya, diperoleh gambaran sebagai berikut:</p> <p>Dari sektor belanja daerah, berdasarkan APBD-P tahun 2013-2017 dari akumulasi rencana belanja daerah sebesar Rp290.891,88 milyar, realisasinya sampai dengan akhir semester I tahun 2017 sebesar Rp182.594,95 milyar atau 62,77% dari akumulasi target APBD-P 2013-2017.</p> <p>Dalam tiga tahun terakhir penyerapan belanja daerah tahun 2016 adalah yang tertinggi bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang teresap 72,10%, dan tahun 2014 yang teresap 59,39%.</p> <p>Penyerapan belanja daerah yang rendah ini terutama terjadi pada tahun 2014 karena terlambat ditetapkannya Perda APBD-P TA. 2014. Sedangkan permasalahan penyerapan belanja daerah pada tahun 2015 terjadi karena dasar hukum yang kurang kuat dalam melandasi penetapan APBD tahun 2014.</p> <p>Semakin besar penyerapan belanja daerah berarti semakin banyak program pembangunan yang berjalan dan sebaliknya semakin kecil penyerapan belanja daerah berarti semakin sedikit program pembangunan yang dapat dijalankan.</p> <p>Dengan penyerapan belanja daerah yang lebih berkualitas diharapkan lebih berdampak positif terhadap kue pembangunan yang dinikmati oleh rakyat yang lebih luas. Terlebih dengan penajaman skala prioritas dan pengalokasian belanja daerah yang lebih berpihak kepada lapisan rakyat berpenghasilan terbawah maka diharapkan belanja daerah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Hal ini tampak dari beberapa indikator yang telah menunjukkan adanya perbaikan kehidupan masyarakat yaitu berupa indikator ekonomi, indikator sosial, indikator pembangunan manusia (IPM), yang menunjukkan dampak program yang dirasakan masyarakat, sebagai berikut:</p>	Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 9	- Pemerintahan	- Bappada Bidang PPP dan PPPP	
1	Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Kinerja pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta pada tahun awal RPJMD (tahun 2013) tercatat sebesar 78,08 dan meningkat hingga mencapai 79,60 pada tahun 2016, lebih tinggi dari rata-rata tingkat nasional sebesar 69,24. Hal ini mengindikasikan besarnya kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan.	Informasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 9, Pidato DPRD Hal. 10	- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPS	
2	Indikator Ekonomi Dalam lima tahun terakhir pencapaian indikator ekonomi sebagai berikut:		Lampiran Kep. DPRD Hal. 10, Pidato DPRD Hal. 11			
	- Pertumbuhan ekonomi secara nasional yang berkisar antara 4,79% sampai 5,78% per tahun.	Informasi		- Perekonomian	- Biro Perekonomian	

Naskah Rekomendasi		Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan PDRB per kapita yang rata-rata tumbuh sebesar 10,29%, dari sebelumnya sebesar Rp155,17 juta rupiah per kapita pada tahun 2013, meningkat hingga mencapai Rp207,99 juta rupiah per kapita pada tahun 2016. Dilihat dari pemerataan pendapatan (gini ratio), terjadi penurunan ketimpangan pendapatan dari 0,43 pada tahun 2014 menjadi 0,39 pada tahun 2016. Tingkat inflasi, dalam dua tahun terakhir dapat dikendalikan pada tingkat 3,30% pada tahun 2015 dan menjadi 2,37% pada tahun 2016. Kinerja perekonomian Jakarta dapat juga dilihat dari stabilnya nilai ekspor-impor barang dan jasa selama lima tahun terakhir. Nilai ekspor produk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 sebesar 11.375,24 juta US\$ meningkat menjadi sebesar 11.546,19 juta US\$ pada tahun 2014. Meskipun terjadi perlambatan ekonomi global yang juga berdampak terhadap perekonomian Jakarta namun nilai ekspor produk Provinsi DKI Jakarta kembali bertumbuh menjadi sebesar 11.033,05 juta US\$ pada tahun 2016. Dari sisi kesempatan kerja juga terjadi kinerja yang menggemibirkan, yaitu terjadinya penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 9,87% pada tahun 2012 menjadi 6,12% pada tahun 2016. Selain itu juga tampak dari jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta, jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari 2,31 juta orang pada tahun 2013 menjadi sebesar 2,51 juta orang pada tahun 2016. 	<p>Informasi</p> <p>Informasi</p> <p>Informasi</p> <p>Informasi</p> <p>Informasi</p> <p>Informasi</p>		<p>- Perekonomian</p> <p>- Perekonomian</p> <p>- Perekonomian</p> <p>- Perekonomian</p> <p>- Perekonomian</p> <p>- Perekonomian</p> <p>- Perekonomian</p>	<p>- Biro Perekonomian</p> <p>- Biro Perekonomian</p> <p>- Biro Perekonomian</p> <p>- Biro Perekonomian</p> <p>- Biro Perekonomian</p> <p>- Biro Perekonomian dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p>	
3	<p>Indikator Sosial</p> <p>Jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 tercatat sebesar 385.840 orang atau 3,75% dari total penduduk Provinsi DKI Jakarta. Jumlah penduduk miskin ini mengalami kenaikan sedikit bila dibandingkan pada tahun 2013 yang disebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global tahun 2014 yang melanda seluruh negara-negara di dunia yang juga berimbas terhadap perekonomian Jakarta. Dan telah dilakukan berbagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan, antara lain mengimplementasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Bantuan Iuran BPJS, penciptaan lapangan kerja padat karya melalui rekrutmen PPSU, dan program-program lainnya.</p> <p>Pencapaian ketiga indikator tersebut menunjukkan keberhasilan dalam mengelola pembangunan dan bahwa pembangunan yang dijalankan telah berada di jalur yang tepat. Dimana berbagai upaya pembangunan dibidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur kota yang telah kita kerjakan bersama berhasil meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Rekomendasi DPRD terhadap belanja daerah dan penyerapan belanja daerah adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan sasaran dan prioritas belanja sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perda RPJMD. Mengakomodir seluruh program yang dijanjikan melalui aspirasi masyarakat dalam musrenbang Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan. Menyediakan alokasi anggaran yang cukup dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. 	<p>Informasi</p> <p>Rekomendasi</p> <p>Rekomendasi</p> <p>Rekomendasi</p> <p>Rekomendasi</p>	<p>Lampiran Kep. DPRD Hal. 10, Pidato DPRD Hal. 12-13</p> <p>Lampiran Kep. DPRD Hal. 11, Pidato DPRD Hal. 12-13</p>		<p>- Bappeda Bidang PPP</p> <p>- Bappeda Bidang PPP</p> <p>- Bappeda Bidang PPP</p> <p>- Bappeda Bidang PPP</p>	

Naskah Rekomendasi		Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
-	Lebih memprioritaskan sektor UMKM sebagai penyedia barang dan jasa dengan tetap mempertahankan kualitas pekerjaan.	Rekomendasi	-	- Perekonomian	- Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	
-	Terkait dengan penyerapan belanja daerah, perbaikan tata kelola lelang sehingga menimbulkan kepastian bagi pihak ketiga yang telah memenangkan lelang	Rekomendasi	-	- Perekonomian	- Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	
-	Mengurangi kesalahan-kesalahan administrasi penganggaran seperti salah nomenklatur, salah kode rekening, salah tupoksi SKPD/UKPD dan lain-lain.	Rekomendasi	-	- Perekonomian dan Pemerintahan	- Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Bappeda Bidang PPP	
C. Pembiayaan Daerah						
Pembiayaan daerah seharusnya dimaksudkan bukan untuk meningkatkan penyerapan APBD dengan mengalokasikan PMD secara besar-besaran tetapi utamanya untuk menutup defisit anggaran. Prioritas PMD dapat diberikan bila PD dan PT Patungan tersebut mengemban tugas pelayanan publik.						
BIDANG PEMBANGUNAN						
1 Perencanaan Pembangunan						
<p>DPDR dapat memahami bahwa perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah, yang kemudian dijabarkan kedalam Program Tahunan. Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan perencanaan pembangunan di DKI Jakarta yang baik dan terpadu dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, RPJP dan RPJM.</p> <p>Melalui perencanaan yang baik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dapat menggunakan APBD secara efektif dan efisien serta mengurangi Silpa setiap tahunnya.</p> <p>DPDR mendukung pengadaan barang dan jasa melalui Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dengan sistem e-katalog.</p> <p>Melalui upaya ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin mampu menjaga akuntabilitas dalam proses perencanaan. Hal ini perlu mendapat perhatian adalah upaya memperkecil kegagalan realisasi proyek pembangunan, sebagai akibat dari terbatasnya waktu yang tersedia dan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran, disamping penyelenggaraan lelang proyek yang lebih awal, dalam rangka memperkecil kegagalan penyelesaian proyek pembangunan, perlu perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pembebasan lahan khususnya Tahun 2017</p> <p>DPDR mengharapkan kedepan agar tidak terjadi miss communication antara BPBJ dengan instansi terkait dalam pencantuman nomenklatur yang mengakibatkan tidak terserapnya anggaran perlu dilakukan koordinasi sebelum dilakukan proses pelelangan.</p>						
		Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 11, Pidato DPRD Hal. 13	- Pemerintahan dan Perekonomian	- Bappeda Bidang PPP dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	

Naskah Rekomendasi		Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
<p>2 Pengendalian Banjir, Rob dan Genangan Air DPRD dapat memahami bahwa pengendalian banjir, rob dan genangan air dalam kurun waktu 5 Tahun, sudah ada peningkatan yang berarti. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berusaha menangani banjir dengan berbagai upaya, khususnya Pembangunan Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat, pembangunan tanggul A National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) pada Aliran Tengah dengan pemancangan sheetpile sepanjang 3.683 m di Luar Batang dan Kamal Muara, di Aliran Barat dengan Pemancangan Spun Pile sepanjang 61 m di Muara Baru serta Aliran Timur dengan pemancangan Spun Pile sepanjang 250 M di Kali Blencong, penataan Waduk Ria Rio dan Waduk Pluit untuk peningkatan kapasitas badan air, Pembangunan Sistem Folder dan Long Storage serta dilakukan penguatan di seluruh drainase kota. Selain itu juga telah dilaksanakan pembebasan tanah untuk Kali/Saluran seluas 452.937 M2. DPRD mengharapakan perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya masalah pembebasan tanah untuk waduk, situ, embung dan kali yang menjadi kewenangan Pemerintah DKI Jakarta. Perlu dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan pemerintah pusat sebagai pelaksanaan pembangunan fisik, agar program tersebut segera dapat terealisasi. Terkait pengendalian perlu dilakukan kerjasama dengan daerah penyangga yang berbatasan dengan Jakarta (Jabodetabekjur) khususnya dengan daerah Jawa Barat dan Banten agar pengendalian banjir di Ibukota dapat lebih berhasil diatasi.</p>	Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 11, Pidato DPRD Hal. 13-14	SPKLNH	Dinas Sumber Daya Air		
<p>3 Peningkatan Jalan dan Jembatan Ketidakeimbangan antara peningkatan jalan dengan peningkatan jumlah pengguna jalan (kendaraan/orang), merupakan kondisi yang menimbulkan masalah kemacetan di Ibukota Jakarta. Meskipun belum berhasil secara signifikan mengatasi kemacetan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya secara maksimal untuk meminimalisir kemacetan yang ada di Ibukota Jakarta, yaitu dalam kurun lima tahun telah menyelesaikan pembangunan 3 Flyover (Fly Over Pulogebang, Fly over Kuningan Sisi Selatan dan STS Permata Hijau), peningkatan 11 ruas jembatan dan penyelesaian pembangunan Simpang Susun Semangi dan Jalan Layang Non Nol Ciledug-Blok M-Tendean, serta Penyelesaian Peningkatan Jalan-jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta seluas 756.786 M2, Penyelesaian Penataan Jalur Pedestrian/Trottoir seluas 160.684 M2 dengan panjang 49.752 M. DPRD mengharapakan agar pembangunan Fly over dan Underpass dan jalan layang non tol serta pembangunan MRT tetap terus dilanjutkan. Perlu dilakukan perbaikan peningkatan kapasitas jalan lokal, arteri dan kolektor serta pemeliharaan dan perbaikan jalan-jalan yang rusak dan berlubang.</p>	Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 12, Pidato DPRD Hal. 14	SPKLNH	Dinas Bina Marga		

	Naskah Rekomendasi	Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
4	<p>Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota Dinas Kehutanan : Sebagai tindak lanjut dalam Amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mensyaratkan Jakarta sebagai Ibukota yang harus mampu mencapai target pada pengadaaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan harus tercapai sebesar 30 % dari luas wilayah DKI Jakarta, namun hingga saat ini pencapaian RTH di Jakarta kurang lebih baru mendekati 10 %.</p> <p>Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memelihara lingkungan hidup telah dilakukan melalui pembangunan, pemeliharaan dan penambahan lahan taman kota, taman interaktif, lahan makam, jalur hijau, dan RTH. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya meningkatkan kualitas RTH melalui penataan jalur hijau, pendirian dan penambahan lahan. Permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan RTH adalah penambahan perluasan lahan yang mengalami kendala baik secara administrasi maupun fisik dilapangan. Oleh karena itu DPRD mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menemukan solusi terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pembebasan/pengadaan lahan RTH, seperti melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan sehingga kedepan jangan sampai terulang kembali dengan alasan status tanah yang belum jelas dan lain lain.</p> <p>Pengelolaan sampah di Ibukota Jakarta sudah selayaknya menjadikan contoh bagi kota-kota lain di negara kita. Janganlah keberhasilan pengelolaan sampah/kebersihan diukur dari tingkat penghasilan atau APBD suatu daerah, tetapi yang paling mendasar adalah tingkat kedisiplinan warga untuk mengelola sampah mulai dari hulu di tingkat RT atau RW dilanjutkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampai ke tempat pengumpulan terakhir Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST). Sebagai Warga Ibukota warga DKI Jakarta seyogyanya bisa menjadikan contoh dalam mengelola sampah bagi warga kota lain. Warga DKI Jakarta seharusnya sudah mampu mengolah sampah rumah tangga, memilah sampah organik, un organik, sampah basah, sampah kering dan seterusnya, agar pengelolaan selanjutnya lebih mudah dan teratur.</p> <p>DPRD memberikan apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan dan memperluas sentra 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) di 5 Wilayah Kota, agar kedepan dapat di kembangkan dan diperluas jangkauannya.</p> <p>Dalam rangka mengantisipasi peranggulangan sampah yang semakin besar di masa mendatang, perlu pemikiran untuk mengurangi kapasitas TPST. Bantar Gebang yang sampai saat ini sudah mencapai 6500 ton/hari untuk itu perlu banyak pembangunan Intermediated Treatment Facility (ITF) di DKI Jakarta dengan tehnologi canggih dan ramah lingkungan yang mana dengan sistem pengelolaan sampah ITF ini akan mampu menambah kapasitas pengolahan sampah sebanyak 3000 ton/hari. melalui upaya tersebut maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap akan mengurangi ketergantungan kepada TPST. Bantar Gebang.</p>	Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 12. Pidato DPRD Hal. 15-16	SPKLNH	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan	
		Rekomendasi		SPKLNH	Dinas Lingkungan Hidup	

	Naskah Rekomendasi	Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
5	<p>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Kebijakan penyediaan perumahan rakyat di Provinsi DKI Jakarta difokuskan kepada pembangunan Rumah Susun khususnya bagi golongan berpenghasilan rendah, masyarakat marginal yang bermukim dipinggiran sungai dan di bawah jembatan dan di daerah kumuh dan padat penduduk. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah tentang RTRW 2030 Provinsi DKI Jakarta dan mempertimbangkan sulit dan mahalnya pembebasan lahan di wilayah DKI Jakarta.</p> <p>Dari Tahun 2013 - 2017 rumah susun sudah terbangun sebanyak 5.177 unit hunian dari target 2.443 unit hunian (telah melampaui target). Dalam rangka mendukung kebijakan permukiman dan interaksi warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebanyak 123 lokasi dan CSR sebanyak 57 lokasi. Dan ada 100 lokasi pembangunan RPTRA sedang dalam proses penyelesaian dalam Tahun 2017.</p> <p>Untuk menjadi catatan terkait pembangunan Rumah Susun perlu ada pengawasan yang ketat agar dalam pembangunan Rumah Susun hasilnya lebih manusiawi jangan asal terbangun, hal ini kami sampaikan karena dari hasil peninjauan ke lokasi pembangunan Rumah Susun masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan dan perlu dilakukan perbaikan seperti tembok/dinding yang tidak rata, pengecatan yang asal asalan, banyak bangunan yang retak, dan lain-lain.</p> <p>DPRD berharap kepada Pemerintah DKI Jakarta, khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus lebih selektif lagi dalam mencari vendor sebelum melakukan proses pembangunan dan mengharapkan jangan hanya memikirkan pencapaian target tapi harus juga dibarengi dengan penyerapan anggaran sehingga tidak terjadi silpa setiap tahunnya.</p>	Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 13, Pidato DPRD Hal. 16	- SPKLLH	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
6	<p>Penataan Ruang</p> <p>Sebagai tindak lanjut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ. Dengan terbitnya UU dan Perda tersebut merupakan tonggak penegakan dan penataan ruang yang semakin baik di masa yang akan datang. Perlu komitmen yang kuat dari Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD dan seluruh masyarakat Jakarta agar perda tersebut dapat berjalan dengan baik.</p> <p>Diharapkan melalui perda RTRW urusan penataan ruang semakin baik permasalahan ketatakotaan, kesemerawutan, kemacetan dan banjir dan lainnya dapat di atasi.</p> <p>Terkait pengawasan dan penertiban bangunan pada saat ini bisa dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan karena perzinan sekarang ada di DPM & PTSP. DPRD mengharapkan kepada Dinas Cipta Karya , Tata Ruang dan Pertanahan melakukan koordinasi dengan dinas terkait apabila ingin melakukan penertiban bangunan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penertiban.</p> <p>Kesimpulan</p>	Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 14, Pidato DPRD Hal. 17-18	- SPKLLH, Perekonomian dan Pemerintahan	- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satpol PP	
1	DPRD mengharapkan kepada seluruh SKPD dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup agar lebih matang/baik dalam membuat perencanaan kegiatan sehingga tidak terjadi lagi kegiatan yang tidak teresap yang membuat silpa	Rekomendasi		- Pemerintahan	- Bappeda Bidang SPKLLH	
2	DPRD mengharapkan kedepan tidak ada lagi kegiatan yang tidak teresap di karenakan gagal lelang dan juga pembebasan lahan oleh karena itu kedepan Dinas harus melakukan koordinasi dengan BPN terkait gagalnya proses pembebasan lahan dikarenakan status tanah atau kepemilikan lahan.	Rekomendasi		- Perekonomian dan Pemerintahan	- Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa dan Bappeda Bidang SPKLLH	
3	DPRD mengharapkan kedepan dapat mengkaji ulang lelang konsolidasi diseluruh SKPD	Rekomendasi		- Perekonomian	- Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	

Naskah Rekomendasi		Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
4	DPRD mengharapkan kepada Pemerintah Khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membuat kebijakan khusus untuk mengatasi masalah tunggakan Rumah Susun yang saat ini sedang terjadi dan apabila di diabaikan akan menjadi masalah di kemudian hari	Rekomendasi		- SPKLNH	Dinas Perumahan dan Unit Pengelola Rumah Susun	
5	DPRD mengharapkan ke pada Dinas Kehutanan tidak terulang kembali dalam perencanaan pembebasan lahan yang tidak teresap seperti pada tahun 2016 yaitu gagalnya pembebasan lahan EX Kedutaan Inggris sehingga menjadi silpa dan banyaknya proses gagal lelang (lelang konsolidasi) pada tahun yang sama	Rekomendasi		- SPKLNH	Dinas Kehutanan	
BIDANG KESEJAHTERAAN						
A URUSAN PENDIDIKAN						
	Dalam mencermati urusan pendidikan dari tahun 2013-2017 DPRD memberikan catatan dari berbagai persoalan dibidang pendidikan yang berkembang dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :	Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 14, Pidato DPRD Hal. 18			
1	DPRD mengapresiasi program KJP (kartu Jakarta Pintar) yang telah direalisasikan sejak tahun 2013 dalam rangka membantu siswa di wilayah DKI Jakarta dan terus memantau pelaksanaan program ini karena masih ditemui penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	
2	Dalam penerbitan dan pendistribusian Kartu Jakarta Pintar (KJP) diharapkan benar-benar tepat sasaran terutama kepada warga yang berhak menerimanya KJP ini adalah program keberhasilan dari Gubernur dan diharapkan dapat diteruskan oleh Gubernur mendatang.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	
3	DPRD mengapresiasi Program KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa) yang di mulai sejak tahun 2016 dan diharapkan jumlah peserta didik semakin meningkat setiap tahunnya	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	
4	Dalam rangka menciptakan pendidikan yang berkarakter, DPRD melihat betapa pentingnya pendidikan sejak usia dini atau PAUD dengan menekankan perlunya dinas pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan di PAUD, standarisasi guru, legal aspek dalam pelaksanaan PAUD di DKI Jakarta.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	
5	Melihat alokasi anggaran dinas pendidikan sejak tahun 2013-2017 +26% melebihi 20% seperti yang di amanatkan dalam undang-undang, DPRD menilai adanya kesungguhan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan diwilayah Provinsi DKI Jakarta	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	
6	Dalam mendukung sarana dan prasarana pendidikan, DPRD menilai kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan proses belajar mengajar dengan melakukan rehab total dan rehab berat gedung-gedung sekolah disepanjang tahun 2013-2014, tapi tetap DPRD meminta Gubernur mempertimbangkan rehab fasilitas sarana dan prasarana gedung sekolah-sekolah swasta.	Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 15, Pidato DPRD Hal. 19-20	- Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	
7	Untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dan keluarga yang tidak mampu, DPRD meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat aturan yang berkaitan dengan pemberian beasiswa bagi siswa putus sekolah khususnya di sekolah-sekolah swasta.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	
8	Terkait kekurangan tenaga pendidik di Provinsi DKI Jakarta dan untuk mengatasi krisis guru ditahun 2022, DPRD menyoroti perlu adanya perbaikan dalam sistem perekrutan guru-guru PNS dan mencari solusi penyelesaian persoalan guru honor dan guru bantu.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	
9	Pelaksanaan sistem lelang konsolidasi terhadap rehab berat dan total pada prakteknya sering mengalami kendala, DPRD merekomendasikan untuk meninjau kembali pelaksanaan sistem lelang konsolidasi ini.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	Dinas Pendidikan dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	

Naskah Rekomendasi		Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
10	Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) merupakan terobosan sistem pendidikan yang meminimalisasi kecurangan ujian, namun kedepannya sistem ini harus ditingkatkan 1 (satu) siswa menggunakan 1 (satu) komputer agar targetnya dapat terpenuhi.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Pendidikan	
B URUSAN KESEHATAN						
1	DPRD mengapresiasi program pemerintah daerah melalui pelayanan Ketuk Pintu layani dengan hati dengan prinsip pelayanan kesehatan yakni melayani dengan hati sampai tuntas, orang sakit tidak boleh menjadi miskin, diharapkan prestasi dan program unggulan ini dapat terus ditingkatkan dan program dapat diteruskan di pemerintahan mendatang.	Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 15, Pidato DPRD Hal. 20	- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Kesehatan	
2	DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar rumah sakit swasta di wilayah DKI Jakarta dapat seluruhnya melayani pasien BPJS tanpa terkecuali dan mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengatur hal tersebut.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Kesehatan	
3	Apresiasi kepada pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan membuat layanan kesehatan yang terintegrasi JSC (Jakarta Smart City), diharapkan kedepannya sistem ini dapat terintegrasi secara menyeluruh dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan	- Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
4	Dalam peningkatan layanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, DPRD melihat kesungguhan pemerintah dalam memberi layanan prima kepada masyarakat dengan mengadakan armada ambulance disemua tingkatan mulai dari kelurahan dan jumlahnya terus meningkat dari 2013 yang hanya 18 buah menjadi 175 ditahun 2018.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Kesehatan	
5	Program BPJS agar segera mungkin diperbaiki dengan membuat aturan penanganan pasien keadaan darurat agar diterima ditangani rumah sakit, perlu perhatian semua pihak. Saran juga kepada dinas kesehatan dan BPJS dengan mereview kembali paket INA CBGS	Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 15, Pidato DPRD Hal. 21	- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Kesehatan	
6	DPRD mengapresiasi kepada pemerintah karena dalam kurun waktu 5 tahun memberi pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta dengan membangun 44 puskesmas di kecamatan, 285 puskesmas kelurahan, 30 RSUD/RSKD dimana layanan sudah cukup baik.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Kesehatan	
7	Selama kurun waktu 2013-2017 pemerintah mampu meningkatkan target kepesertaan PBI, ditahun 2017 telah mencapai 3.921.538 dengan target yang tercover 3.621.638 atau 92,36%.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Kesehatan	
8	Apresiasi kepada pemerintah terhadap program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah yaitu berupa penyediaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan daerah yang semakin tahun terus meningkat, namun DPRD memandang perlu bahwa ada penambahan dana PBI.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Kesehatan	
9	Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kesehatan di RSUD, DPRD menilai perlu adanya koordinasi yang baik dengan BPJS, dengan hal pembayaran klaim dari BPJS kepada pihak rumah sakit agar pelayanan dapat maksimal.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Kesehatan	
C URUSAN SOSIAL						
1	Permasalahan PMKS yang beraktifitas di jalan dan mengganggu ketertiban umum harus dilakukan penertiban secara maksimal dan terpadu	Rekomendasi	Lampiran Kep. DPRD Hal. 16, Pidato DPRD Hal. 21-22	- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Sosial	
2	Perlu koordinasi antar lembaga sosial baik pemerintah atau swadaya masyarakat dalam melakukan pelayanan.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Sosial	
3	Adanya koordinasi antara dinas sosial dan dinas kesehatan (rumah sakit) untuk menangani pasien yang terlantar dan tinggal menginap di rumah sakit.	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan	
4	Perlu peningkatan bantuan perlindungan sosial dan jaminan sosial kepada PMKS dengan cara peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS di panti sosial	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Sosial	
5	Perlu diberdayakan kembali keluarga miskin dan PMKS potensial dengan memberi bantuan pekerjaan atau lapangan pekerjaan agar dapat menghidupi diri dan keluarganya	Rekomendasi		- Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Sosial	

Naskah Rekomendasi		Jenis	Sumber	Bappeda Koordinasi/Bidang	SKPD	Tindak Lanjut SKPD
D	URUSAN PEMUDA DAN OLARAHAGA		Lampiran Kep. DPRD Hal. 16, Pidato DPRD Hal. 22			
1	Untuk Olahraga dan kepemudaan, DPRD mengharapkan agar prestasi-prestasi yang diraih oleh atlet-atlet DKI dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan.	Rekomendasi		Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2	Persoalan KONI, dualisme kepemimpinan, agar dapat diatasi dengan baik sehingga pembinaan atlit-atlit dapat berjalan lancar kembali.	Rekomendasi		Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
3	Persoalan bonus atau janji kepada atlit-atlit yang berprestasi agar dapat terlaksana.	Rekomendasi		Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
4	Alokasi dana anggaran pembinaan atlit-atlit DKI agar dapat ditambahkan agar pembinaan kepada atlit-atlit dapat terus ditingkatkan.	Rekomendasi		Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
5	DPRD merekomendasi pengembangan pembinaan yang terintegrasi mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan agar generasi muda yang berprestasi dapat dibina untuk kemajuan dunia olahraga di DKI Jakarta.	Rekomendasi		Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
6	Kegiatan aspirasi masyarakat diharapkan tidak dikerjakan di akhir tahun dan perencanaannya harus dengan baik	Rekomendasi		Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
E	URUSAN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA		Lampiran Kep. DPRD Hal. 16, Pidato DPRD Hal. 23			
1	DPRD mengapresiasi project Gubemur dalam membangun RPTRA Kalijodo menjadi tempat olahraga "sport center" yang dapat bermanfaat bagi rakyat Jakarta.	Informasi		Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan	
2	DPRD menilai keberhasilan Gubemur dalam membangun RPTRA diseluruh wilayah DKI Jakarta yang berkembang pesat, diharapkan kedepannya pembangunan RPTRA diwilayah kumuh dapat ditingkatkan	Rekomendasi		Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
3	Program Keluarga berencana diwilayah DKI Jakarta sudah berjalan baik dengan meningkatnya jumlah pasangan usia subur menjadi peserta KB baru dan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif.	Rekomendasi		Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
4	Dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan, DPRD merekomendasikan agar dibangun Tempat Penitipan anak (TPA), khususnya diwilayah yang rawan kekerasan terhadap anak.	Rekomendasi		Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan	
	Demikian Rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Dengan harapan basil pembahasan yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi Eksekutif untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.		Lampiran Kep. DPRD Hal. 17, Pidato DPRD Hal. 23-24			